

ABSTRAK

MUHLIS MADANI. Interaksi Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyusunan Kebijakan Anggaran di Kota Makassar (Promotor Rakhmat, Haedar Akib dan Muhammad Rusdi).

Permasalahan penyusunan kebijakan RAPBD sesungguhnya terletak pada interaksi aktor yaitu pemerintah daerah dan legislative di mana masing-masing memiliki kewenangan yang pada akhirnya mempengaruhi proses penetapan kebijakannya.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan mekanisme pola hubungan antara Pemerintah Daerah dan DPRD dalam proses perumusan kebijakan penganggaran (APBD) serta sikap dan perilaku aktor yang terjadi di dalam proses pembahasan anggaran APBD 2009. Untuk mencapai tujuan itu maka digunakan metode deskriptif kualitatif dengan dasar studi kasus di Kota Makassar. Analisis data yang digunakan adalah model interaktif untuk mendapatkan gambaran bentuk dan tipe interaksi antara aktor dalam proses penyusunan kebijakan APBD.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola interaksi Pemerintah Daerah dengan DPRD di Kota Makassar dalam proses penyusunan kebijakan perencanaan penganggaran (RAPBD) cenderung terbagi pada tiga bentuk yaitu akomodasi, dominasi dan kompromi. Interaksi pada tahapan pembahasan di panitia anggaran dan di tingkat komisi cenderung lebih dominatif dari pihak DPRD. Sementara itu, pada tahapan perumusan KUA dan PPA justru legitimasi pemerintah daerah lebih dominan. Pada sisi lain interaksi kompromistik lebih banyak terjadi pada saat pembahasan akhir anggaran yang dibahas pada masing-masing SKPD yang ada. Perilaku aktor dalam proses penyusunan kebijakan APBD secara langsung memberikan implikasi terhadap proses perumusan APBD yang dilakukan. Kecenderungan perilaku antara pihak yang terlibat dalam pembahasannya relatif sesuai dengan komposisi fungsi dan kewenangan yang dimiliki masing-masing. Pemerintah Daerah pada umumnya lebih bersifat koersif pada saat pembahasan KUA dan PPA yang masing-masing SKPD memiliki otoritas penyusunannya. Sementara itu, perilaku opositif lebih terbuka dalam proses berdiskusi dan berdialog bersama dengan pihak DPRD untuk membahas RAPBD yang diusulkan. Dalam posisi seperti itu, DPRD secara umum menunjukkan perilaku yang cenderung menguasai (powership) oleh situasi di mana seluruh tahapan pembahasan yang melibatkan pihak DPRD dan selalu diwarnai oleh perilaku dominatif dan koersif terhadap aktor lain dalam proses negosiasi yang ada.

ABSTRACT

MUHLIS MADANI. Interaction of Regional Government and Regional House of Representative (DPRD) in Formulating Budgeting Policy in Makassar (Promoters Rakhmat, Haedar Akib and Muhammad Rusdi).

The problem of formulating a draft regional government budget (RAPBD) is actually lied in the interaction of involved actors, the regional government and legislatives, in which they individually have an authority that typically influence their policies decision process.

This study was aimed to find out and explain the mechanism of relationship pattern between regional government and DPRD in a proses of formulating budget (APBD) policies and the behaviors of actors in the process of discussing the APBD 2009, using a qualitative descriptive method. This study was a case study conducted in Makassar. Data were analyzed by interactive model analysis to find out the description about types and forms of interaction between the actors involved in formulating regional government budget (APBD).

Study results indicated that interaction between Regional Government and DPRD of Makassar in the process of formulating draft regional government budget (RAPBD) tended to take place in three forms: accommodation, domination, and compromise. It was found that interaction in discussion level among budgeting committee and in commission level tended to be dominated by DPRD representatives. Whereas, in the step of KUA and PPA formulation, the legitimation of regional government dominated. The compromise interaction took place more at final discussion of the draft budget. In the other hand, the behaviors of actors in the process of formulating APBD directly implicated in the formulation process of draft regional government budget. The tendency of behavior between the involved parties in its discussion was relatively appropriate to the composition of functions and authorities owned by each of the actor. The regional government (executives) was generally coercive in the discussion of KUA and PPA in which each of the SKPD had an authority in its formulation. Whereas, the offensive behavior was more pronounced in shared discussion and dialogue with DPRD (legislatives) to discuss about proposed RAPBD. In such position, DPRD generally demonstrate an arrogant dominant behavior because almost all of the discussion steps, when involving DPRD, characterized by dominance of them in the negotiation processes.